



DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA SKPD)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 ini dapat diselesaikan dengan baik.

RENJA SKPD SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis ini memuat kondisi umum, isu-isu strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda pembangunan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis untuk tahun anggaran 2017 yang akan datang.

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan adanya RENJA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten ini, diharapkan seluruh satuan kerja perangkat daerah dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau acuan untuk merencanakan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai dengan APBD Kabupaten Bengkalis, APBD Provinsi Riau, APBN, maupun Sumber Pendanaan lainnya.

Pada akhirnya kami sangat menyadari bahwa RENJA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen Dinas Kesehatan maupun pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan RENJA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis di tahun yang akan datang.

Demikianlah semoga RENJA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis ini dapat berguna bagi kita semua.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS

H. MOH. SUKRI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 195912301985031008

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Tujuan	7
1.4 Sasaran	7
1.5 Evaluasi Pencapaian Kinerja	7
1. Standar Pelayanan Minimal	7
2. Indikator Kinerja Utama	11
3. Analisis Pencapaian Kinerja.....	11
BAB II. RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN	21
2.1 Program Dan Kegiatan	21
2.2 Pagu Indikatif	26
2.3 Indikator Kinerja Program dan Target Capaian	29
BAB III. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	31
3.1 Perencanaan Kinerja	31
3.2 Perjanjian Kinerja	32
3.3 Penetapan Kinerja	34
BAB IV. PENUTUP	35
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan mempertimbangkan urutan pilihan dan ketersediaan sumber daya. Sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis hendaknya disusun dengan memperhatikan kaidah tersebut melalui penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Untuk menjamin keberlanjutan tersebut, rencana pembangunan kesehatan Kabupaten Bengkalis dituangkan dalam wujud dokumen perencanaan yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional didalamnya diatur tentang tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang serta disebutkan juga bahwa Renstra SKPD sebagai rencana 5 tahunan SKPD harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD.

Secara substansi, Renja SKPD memuat evaluasi Renja SKPD tahun sebelumnya, analisis terhadap evaluasi dan rancangan prioritas pembangunan kesehatan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif.

Penyusunan Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis tahun 2017 berpedoman pada Program Pembangunan Bupati Terpilih yang merupakan rancangan awal Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2021 serta materi awal penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2016 – 2021 dengan tetap memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, permasalahan yang ada dan isu strategis yang dihadapi.

Renja SKPD ini juga memiliki peran strategis untuk integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara perencanaan strategis di bidang kesehatan

tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Oleh karenanya penyusunan Renja SKPD tahun 2017 ini juga mengacu kepada Kebijakan-kebijakan di tingkat Provinsi dan juga nasional yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Pusat, Renstra Kementerian Kesehatan 2015 – 2019, SPM nasional bidang kesehatan dan juga Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 – 2018.

Penyusunan Renja SKPD 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan yaitu *teknokratik*, *partisipatif*, *bottom-up* dan *top-down*. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik antara usulan tingkat kecamatan, kegiatan yang disusun di tingkat dinas, kajian di tingkat Kabupaten, serta usulan dari para pemangku kepentingan lainnya baik itu yang diusulkan melalui APBD Kabupaten, usulan ke Provinsi maupun ke tingkat pusat.

Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah dalam menyusun perencanaan pendapatan dan perencanaan belanja. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Bengkalis. Proses *bottom-up* dan *top-down* dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten melalui media musyawarah rencana pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;
24. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025;

29. Peraturan Daerah Kabupten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019;
34. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Riau Nomor tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2014-2018.

Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 tahun 2012 memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di tersebut diatas ,Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan kesehatan;
- b. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2012 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis , terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari Seksi Kesehatan Dasar, Seksi Kesehatan Rujukan dan Seksi Kesehatan Khusus
4. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Lingkungan, terdiri dari Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Seksi Wabah dan Bencana dan Seksi Kesehatan Lingkungan.
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari Seksi Pendayagunaan, Seksi Pendidikan dan Pelatihan dan Seksi Registrasi dan akreditasi.
6. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari Seksi Jaminan Kesehatan, Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan dan Seksi Kefarmasian.
7. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan Gudang Farmasi
8. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan kesehatan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2017.

2. Tujuan

1. Melakukan evaluasi terhadap capaian rencana kerja SKPD tahun lalu dan capaian rencana strategis (Renstra).
2. Melakukan analisis terhadap sasaran target pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkalis terhadap Indikator Kinerja Utama, Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 serta menetapkan pagu indikatif program dan kegiatan sesuai kebutuhan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2017 Dinas Kesehatan meliputi :

Bab I : Pendahuluan yang berisikan secara singkat 1.1 Latar Belakang, 1.2 Landasan Hukum penyusunan Renja SKPD, Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Dinas Kesehatan, kewenangan Dinas Kesehatan serta tugas pokok dan fungsi, 1.3 Maksud dan Tujuan dan 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD meliputi : 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan capaian Renstra SKPD yang memuat hasil review terhadap pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 (Tahun n-2) dan perkiraan capaian Tahun 2016 (Tahun n-1), 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, 2.3. Isu-isu Penting Penyelemnggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan meliputi : 3.1 Telaah Kebijakan Nasional, 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD terkait dengan sasaran dan target kinerja Renstra SKPD, 3.3. Program dan Kegiatan meliputi 3.3.1. Faktor-faktor pertimbangan rumusan program dan kegiatan, 3.3.2. Garis besar rekapitulasi program dan kegiatan antara lain jumlah program dan kegiatan, lokasi kegiatan serta total pagu indikatif program dan kegiatan yang dibutuhkan menurut sumber pendanaannya.

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Kerja Tahun 2015 dan perkiraan capaian pada Rencana Kerja Tahun 2016. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis meliputi 3 (tiga) hal yaitu realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2015 yang dapat dilakukan evaluasi secara berkesinambungan adalah indikator kinerja hasil (outcome) oleh karena indikator kinerja tersebut sudah mengacu kepada indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Namun untuk evaluasi indikator kinerja keluaran (output) terdapat kesulitan dalam menentukan tingkat keberhasilan pencapaian target indikator tersebut. Hal ini dikarenakan pada saat penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran tahunan (RKA/DPA) dalam perumusan dan penetapan indikator berbeda-beda setiap tahunnya, sehingga hal ini juga menyebabkan kesulitan dalam menentukan kegiatan mana yang mencapai target dan mana yang tidak. Oleh karena itu, dalam evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dievaluasi hanya indikator kinerja hasil.

Pada tabel 2.1 tersebut, terdapat 17 program yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 dengan jumlah indikator kinerja hasil

sebanyak 78 indikator. Namun demikian belum seluruh program tercapai indikator kinerja hasilnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program yang telah mencapai kinerja sesuai target atau melebihi targetnya ada 11 program dan yang belum mencapai target ada 5 program, sedangkan dari 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan, sebanyak 9 indikator telah mencapai target, bahkan 8 indikator telah melebihi dari target yang telah ditetapkan dan 12 indikator saja yang belum mencapai target.

2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK/IKU sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008 dan PP 38 Tahun 2007 yang dijabarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Cakupan pelayanan kesehatan dari indikator kinerja utama/indikator kinerja kegiatan, standar pelayanan minimal kesehatan (SPM) dan tatanan pelayanan urusan wajib pada tabel berikut ;

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Angka kelangsungan hidup bayi	Angka	976	995	102
		Angka usia harapan hidup	Tahun	72	72	100
		Angka kematian bayi	per 1000 KLH	24	5	21
		Persentase balita gizi buruk	%	15	0,01	0,07
		Rasio posyandu per satuan balita	100 balita	1	1	100
		Rasio puskesmas per satuan penduduk	per 100.000	1	3	300
		Rasio pustu per satuan penduduk	per 100.000	7	10	143
		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	per 100.000	1	1	100
		Rasio dokter per satuan penduduk :				
		Dokter umum	per 100.000	21	20	95
		Dokter spesialis	per 100.000	6	7	117
		Dokter gigi	per 100.000	9	9	100
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk :				
		Bidan	per 100.000	26	51	197
		Perawat	per 100.000	110	78	71
		Apotoker	per 100.000	17	2	9
		Ahli gizi	per 100.000	25	3	14
Kesmas	per 100.000	8	6	72		
Sanitarian	per 100.000	26	2	9		

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	66	66
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	95	90	95
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	60	60
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA (+)	%	100	45	45
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	214	214
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	56	56
		Cakupan kunjungan bayi	%	100	93	93
		Cakupan kunjungan Puskesmas	%	100	100	100
		Cakupan kunjungan Puskesmas Pembantu	%	100	100	100

Tabel 2.3 Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	INDIKATOR -SPM	SASARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)	(6)
1	Kunjungan Bumil K4	12.684	11.741	93	95
2	Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	2.537	1.679	66	80
3	Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	12.108	10.911	90	90
4	Pelayanan Nifas	11.531	10.952	95	90
5	Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani	1.903	179	9	80
6	Kunjungan Bayi	11.531	10.781	93	95
7	Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	155	93	60	100
8	Pelayanan Anak Balita	61.958	42.011	68	90
9	Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6 - 24 bulan Keluarga Miskin	3.263	419	13	100
10	Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	4	4	100	100
11	Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	10.430	10.110	97	100
12	Peserta KB Aktif	95.231	38.394	40	70
13	Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Acute Flacid Paralysis (AFP) per 100.000 penduduk ≤ 15 tahun	2	1	25	≤ 2
14	Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan Penderita Pneumonia Balita	7.406	1.102	15	100
15	Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan pasien baru TB BTA Positif	643	292	45	100

No	INDIKATOR -SPM	SASARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)	(6)
16	Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penderita DBD yang ditangani	316	678	215	100
17	Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan penderita diare	16.350	11.625	71	100
18	Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	16.233	9.328	57	100
19	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	243	137	56	100
20	Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota	6	6	100	100
21	Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	2	2	100	100
22	Desa Siaga Aktif	155	71	46	80

Tabel 2.4 Capaian Indikator Tatanan Pelayanan Urusan Wajib

NO.	URUSAN	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Kesehatan	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (100%)	Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu	x 100 %	66 %
			Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama		
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan (95%)	Jumlah Ibu Bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu	x 100 %	90 %
			Jumlah sasaran seluruh ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama		
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (100%)	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	x 100 %	60 %
			Jumlah seluruh desa/kelurahan		
		Cakupan Balita Gizi Buruk yg mendapat perawatan (100)	Jumlah balita gizi buruk yg mendapat perawatan di sarana yankes di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu	x 100 %	100 %
			Jumlah seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) (100%)	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yg ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu	x 100 %	45 %
			Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) pada kurun waktu yg sama		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (100)	Jumlah penderita DBD yg ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun	x 100 %	215 %
			Jumlah perkiraan penderita DBD yg ditemukan di suatu wilayah pada kurun waktu yg sama		

NO.	URUSAN	IKK	RUMUS		CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (100)	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata 1	x 100 %	8,62 %
			Jumlah seluruh maskin di kabupaten/kota		
		Cakupan kunjungan bayi (100)	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu	x 100 %	97 %
			Jumlah seluruh bayi lahir hidup di suatu wilayah pada kurun waktu yg sama		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten memperhatikan sinkronisasi Renstra Kementerian Kesehatan RI 2015 – 2019 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 serta Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Riau Tahun 2014 – 2019.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi pembangunan kesehatan 2005- 2025 adalah : 1) pembangunan nasional berwawasan kesehatan; 2) pemberdayaan masyarakat dan daerah; 3) pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan; 4) pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan 5) penanggulangan keadaan darurat kesehatan.

Kebijakan umum pembangunan kesehatan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam merumuskan program dan kegiatan dengan tujuan meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan produktivitas untuk peningkatan sumber daya manusia serta mendorong inovasi dan kreatifitas

kelembagaan pemerintahan desa dalam rangka merekatkan kesatuan dan persatuan masyarakat yang berbudaya.

Seiring dengan arah pembangunan jangka menengah yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019, memperhatikan arah pembangunan pada Sistem Kesehatan Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, isu strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019, serta rancangan Agenda Pembangunan Pasca *MDGs* yakni mengakhiri kemiskinan; pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender; pendidikan berkualitas dan pembelajaran seumur hidup; memastikan kehidupan yang sehat; menjamin ketahanan pangan dan asupan gizi yang baik; akses universal air bersih dan sanitasi dasar; ketahanan energi yang berkelanjutan; menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkeadilan; mengelola asset sumberdaya alam berkelanjutan; memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif; memastikan masyarakat stabil dan damai serta menciptakan lingkungan hidup dan katalisator pembiayaan ditetapkanlah arah kebijakan pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Riau periode 2014-2019 dengan tujuan sasaran sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak
2. Penyediaan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas
3. Penyediaan Obat & Vaksin yang bermutu, terjangkau dan merata sesuai kebutuhan masyarakat serta melakukan pengawasan sediaan Farmasi, Makanan Minuman dan alat kesehatan yang beredar dimasyarakat
4. Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular
5. Peningkatankuantitas dan kualitas SDM kesehatan yang merata

Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Riau merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ada untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan tahun 2014-2019 adalah 1) Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan ibu dan anak; 2) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan bermutu; 3) Meningkatkan ketersediaan obat & vaksin, pengawasan keamanan mutu dan manfaat sediaan Farmasi, Makanan Minuman dan alat kesehatan yang beredar di masyarakat; 4) Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 5) Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan

sesuai dengan standar; 6) Tersedianya tenaga kesehatan (dokter dan tenaga medis) di puskesmas

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan rencana kerja program dan kegiatan lebih mengarah pada tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mewujudkan Misi dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis yaitu terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat dengan sasaran meliputi 1) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat; 2) Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat; 3) Meningkatnya jaminan pembiayaan dan fasilitas kesehatan dengan indikator pendukung administrasi dan manajemen yaitu meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan barang milik daerah. Tujuan dan Sasaran ini merupakan rancangan awal untuk Renstra SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dengan sasaran yang telah ditetapkan menjadi indikator sasaran dari program dan kegiatan meliputi 1). Angka Kematian Bayi (AKB); 2). Angka Kematian Ibu (AKI); 3). Persentase balita gizi buruk; 4) Rasio posyandu per satuan balita; 5) Rasio puskesmas per satuan penduduk; 6) Rasio Puskesmas Pembantu per satuan penduduk; 7) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk; 8) Persentase Puskesmas Terakreditasi; 9) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas; 10) Rasio dokter per satuan penduduk : Dokter umum, Dokter spesialis, Dokter gigi; 11) Rasio tenaga medis per satuan penduduk : Bidan, Perawat, Apoteker, Ahli gizi, Kesmas, Sanitarian; 12) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; 13) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; 14) Cakupan pertolongan persalinan difasilitas kesehatan; 15) Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat makanan tambahan; 16) Cakupan Ibu Hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah; 17) Cakupan Balita Kurus yang mendapat makanan tambahan; 18) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI); 19) Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi; 20) Cakupan penjangkaran kesehatan peserta didik kelas I, VII dan X; 21) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan; 21) Cakupan bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif; 22) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA positif; 23) Cakupan keberhasilan pengobatan TB Paru BTA positif (Succes Rate); 24) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD; 25) Cakupan

penemuan dan penanganan penderita tekanan darah tinggi; 26) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 27) Cakupan kunjungan bayi; 28) Cakupan kunjungan Puskesmas; 29) Cakupan kunjungan Puskesmas Pembantu; 30) Cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan Stop Buang Air Sembarangan (SBS); 31) Cakupan sarana air minum yang dilakukan pengawasan; 32) Cakupan Kunjungan Balita; 33) Cakupan pelayanan antenatal Care (ANC) ibu hamil sesuai standar; 34) Cakupan pelayanan P4K pada ibu hamil difasilitas kesehatan sesuai standar; 35) Cakupan pelayanan jaminan kesehatan di fasilitas kesehatan. Untuk lebih jelasnya target capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada lampiran Renja SKPD ini.

3.3 Program dan Kegiatan

1. Faktor-faktor pertimbangan rumusan program dan kegiatan.

Rumusan program dan kegiatan yang dirumuskan memperhatikan keberlanjutan program dan kegiatan tahun 2015 dengan menilai hasil evaluasi capaian kinerja rencana kerja SKPD terutama capaian kinerja kegiatan yang masih belum sesuai target. Hasil capaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan yang selaras dengan indikator capaian tatanan pelayanan umum dan urusan wajib berdasarkan ketentuan peraturan terkait dengan indikator kinerja utama dan atau indikator kinerja kunci yang menjadi indikator sasaran program kesehatan.

Untuk keselarasan penyusunan program dan kegiatan rencana kerja SKPD Dinas Kesehatan mempertimbangan arah dan kebijakan strategis nasional yang terdapat pada Renstra Kementerian Kesehatan baik tujuan, sasaran serta indikator yang menjadi prioritas nasional serta arah dan kebijakan pembangunan kesehatan Propinsi Riau dengan mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Riau. Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan juga mengarah pada pencapaian indikator MDGs dan SDGs serta memperhatikan program pengentasan kemiskinan dan pengembangan daerah perbatasan dan kepulauan yang ada di Kabupaten Bengkalis.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 SKPD Dinas Kesehatan berdasarkan indikator yang telah disusun dengan jumlah 17 Program terdiri dari 5 program dukungan teknis administrasi dan manajemen serta peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan 12 program peningkatan pelayanan kesehatan, sedangkan terdapat 99 kegiatan terdiri dari 21 kegiatan pelaksanaan teknis administrasi dan sarana prasarana aparatur dan gedung kantor, 7 kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan 5 kegiatan data dan informasi serta capaian kinerja aparatur dan pengelolaan barang milik daerah dinas kesehatan. Untuk kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan terdapat 66 kegiatan yang terdiri dari 3 kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, 8 kegiatan pengembangan penyehatan lingkungan lingkungan, 18 kegiatan pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular, 5 kegiatan perbaikan gizi masyarakat, 4 kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, 8 kegiatan upaya kesehatan masyarakat, 7 kegiatan standarisasi pelayanan kesehatan, 3 kegiatan peningkatan/ pembangunan/ pengadaan fasilitas kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit, 1 kegiatan pelayanan kesehatan lansia, pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan ibu sebanyak 9 kegiatan.

Untuk secara lebih rinci program dan kegiatan pada Renja SKPD Dinas Kesehatan seperti berikut ;

1. Program dan Kegiatan

- a. Program terdiri dari ;
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.001)
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (01.002)
 - 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur (1.02.01.003)
 - 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur (01.005)
 - 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan(01.006)
 - 6) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan(01.015)
 - 7) Program Upaya Kesehatan Masyarakat(01.016)

- 8) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (01.019)
 - 9) Program Perbaikan Gizi Masyarakat(01.020)
 - 10) Program Pengembangan Lingkungan Sehat(01.021)
 - 11) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular(01.022)
 - 12) Standarisasi Pelayanan Kesehatan(01.023)
 - 13) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya(01.025)
 - 14) Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata(01.026)
 - 15) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita(01.029)
 - 16) Program Peningkatan pelayanan kesehatan Lansia(01.030)
 - 17) Program Peningkatan Kesehatan Ibu melahirkan dan anak(01.032)
- b. Kegiatan terdiri dari ;
- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 3) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
 - 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - 5) Penyediaan alat tulis kantor
 - 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 7) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 9) Penyediaan makanan dan minuman
 - 10) Penyediaan jasa keamanan kantor
 - 11) Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah
 - 12) Pembinaan pegawai dan penilaian jabatan fungsional tenaga kesehatan

- 13) Penyediaan jasa sopir
- 14) Penyediaan komunikasi dan informasi public
- 15) Pembangunan gedung kantor
- 16) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 17) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 18) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 19) Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 20) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung /kantor
- 21) Pengadaan tanah
- 22) Penilaian kinerja PNS Tenaga Kesehatan
- 23) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Tenaga Kesehatan (PSDMK)
- 24) Pemutakhiran data pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan
- 25) Pengembangan pendayagunaan SDM Kesehatan
- 26) Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
- 27) Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)
- 28) Evaluasi Pasca Pelatihan
- 29) Bimbingan Teknis Administrasi dan Manajemen Puskesmas
- 30) Inventarisasi aset daerah
- 31) Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja SPM dan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota
- 32) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD
- 33) Pengelolaan data dan informasi kesehatan
- 34) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
- 35) Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
- 36) Pembinaan dan Pengawasan obat dan Makanan
- 37) Peningkatan Kesehatan masyarakat
- 38) Peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
- 39) Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda)
- 40) Pelayanan kesehatan rujukan

- 41) Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN)
- 42) Pendamping Pelaksanaan Kegiatan JKN oleh Daerah
- 43) Perawatan Kesehatan Masyarakat
- 44) Penyediaan bantuan operasional kesehatan
- 45) Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Cetak dan Elektronik
- 46) Pembantuan desa siaga dan pembinaan fasilitator desa siaga
- 47) Pembinaan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Sekolah
- 48) Pembinaan rumah tangga ber PHBS
- 49) Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
- 50) Pemberian tambahan makan dan vitamin
- 51) Penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, kurang Vit A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
- 52) Pertemuan integrasi Proram Gizi, KIA dan Promkes
- 53) Penatalaksanaan Kasus Gizi Buruk
- 54) Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
- 55) Sosialisasi Pemeriksaan Kualitas Air Minum Depot Isi Ulang (DAM)
- 56) Penyediaan air minum dan sanitasi dasar berbasis masyarakat (PAMSIMAS)
- 57) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
- 58) Pelayanan Industri Rumah Tangga
- 59) Pemeriksaan Tempat Pengelola Makanan dan Minuman
- 60) Penyediaan Sarana dan Prasarana Laborarium Lingkungan
- 61) Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Puskesmas
- 62) Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
- 63) Peningkatan Imunisasi
- 64) Penanggulangan penyakit TB Paru Sistem DOTS
- 65) Penanggulangan ISPA
- 66) Penanggulangan P2 Kusta
- 67) Penanggulangan P2 Filariasis

- 68) Penanggulangan P2 Diare
- 69) Pelacakan kasus HIV AIDs serro survey
- 70) Pengendalian kasus gigitan Hewan Penular Rabies (HPR)
- 71) Penanggulangan KLB/ Wabah Penyakit Menular dan Keracunan
- 72) Pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan jemaah calon haji
- 73) Pengendalian dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS
- 74) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit malaria
- 75) Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit Polio
- 76) Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit Campak
- 77) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit DBD
- 78) Pengendalian dan Pelayanan Penyakit Tidak Menular
- 79) Promosi kesehatan pencegahan penyakit menular
- 80) Monitoring evaluasi dan pelaporan
- 81) Penilaian dan Penghargaan Saran Terbaik dan Tenaga Kesehatan Teladan
- 82) Pembinaan pengawasan pelayanan kesehatan dan monitoring prizinan pelayanan kesehatan
- 83) Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik
- 84) Pelaksanaan akreditasi Puskesmas
- 85) Penyusunan perencanaan dan Kebutuhan SDM Kesehatan
- 86) Sosialisasi peraturan perundang-undangan tenaga dan fasilitas kesehatan
- 87) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
- 88) Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar
- 89) Pembangunan rumah sakit
- 90) Penatalaksanaan Asi Eksklusif dan Konseling Menyusui
- 91) Pelayanan kesehatan anak balita
- 92) Pelayanan pemeliharaan kesehatan
- 93) Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang
- 94) Pembinaan kemitraan bidan dan dukun bayi

- 95) Pendataan penjarangan dan rujukan ibu hamil dan bayi risiko tinggi
- 96) Pelayanan kesehatan jaminan persalinan
- 97) Peningkatan Pelayanan kesehatan ibu hamil
- 98) Peningkatan Pelayanan kesehatan bayi
- 99) Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Umumnya pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi serta Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis yang merupakan perwujudan program kerja Buapti Bengkalis meliputi wilayah Gerbang Utama, Gerbang Laksamana, Gerbang Permata dan Gerbang Pesisir yang terfokus pada Gagasan Pembangunan 5 yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia. Pelaksanaan program dan kegiatan penyebaran di Kabupaten, Kecamatan, sampai ke Desa, khususnya untuk kegiatan pembangunan rumah sakit akan dilaksanakan di Pulau Rupat sebagai Gerbang Pesisir, dan Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai dukungan Gerbang Laksamana, sedangkan pembangunan fasilitas kesehatan dan penempatan tenaga kesehatan memandang konsep wilayah tiap Gerbang Pembangunan.

3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif dan sumber pendanaan

Pagu anggaran program dan kegiatan pembangunan kesehatan Tahun 2017 sebagaimana Rencana Kerja (Renja) SKPD berjumlah Rp.235.889.150.484.00 dari APBD Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 228.761.013.924.00 dan sumber dana APBN Rp.7.128.136.560.00 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Untuk belanja program dan kegiatan sumber dana APBD dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.78.765.367.762.00 dan Belanja Langsung Rp.149.995.646.162.00

Lampiran

1. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD 2015
2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD 2015
3. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2017
4. Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat 2017
5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 (Renja 2016)
6. Identifikasi Kebijakan Nasional
7. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
8. Usulan Program dan Kegiatan dari Kabupaten/Kota untuk Nasional dan Propinsi Tahun 2017
9. Prioritas Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat dari Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota dan/atau Forum SKPD kabupaten/kota
10. Penggabungan Prioritas Kabupaten/kota (RPJMD) dengan Rancangan Renja SKPD 2017
11. Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2017
12. Kajian dan prioritas Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2016
13. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Maret 2015 (tahun berjalan)
14. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD tahun berjalan (2015)
15. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017
16. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018

BAB IV
PENUTUP

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan yang dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2017. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 merupakan materi awal penyusunan Rensta Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

Optimalisasi pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Rencana Kerja Tahun 2017 ini akan dilakukan evaluasi kembali selama pelaksanaan program kegiatan tahun 2017 dan secara komprehensif akan dievaluasi pada penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis tahun-tahun selanjutnya. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

Semoga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2017. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Bengkalis, Februari 2016
KEPALA DINAS KESEAHATAN
KABUPATEN BENGKALIS

H.MOH. SUKRI, SH
NIP. 195912301985031008

**MATRIKS RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018
DINAS KESEHATAN**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Hasil) / Kegiatan (Output/Keluaran)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		
			2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		5 1	Belanja Tidak Langsung				78.765.367.762,00				86.641.904.538,20		
		5 1	Belanja Pegawai		Kabupaten	100%	78.765.367.762,00			100%	86.641.904.538,20		
							78.765.367.762,00	APBD			86.641.904.538,20		
		5 2	Belanja Langsung				157.123.782.722,00				159.844.252.594,55		
Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan barang milik daerah	Persentase terselenggaranya pelayanan administrasi umum dan sarana kantor 100%	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi umum dan sarana kantor		100%	7.128.810.296,00			92%	8.485.656.100,40		
		001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah ketersediaan benda pos lainnya yang dibutuhkan	Kabupaten	1 Tahun	8.640.000,00	APBD		1 Tahun	10.368.000,00		
		002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan listrik dan jaringan komunikasi kantor dinas, upt dan jaringannya	Kabupaten / Kecamatan	1 Tahun	722.800.000,00	APBD		1 Tahun	867.360.000,00		
		005	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah PKB/TNKB kendaraan dinas	Kabupaten	86 Unit	80.000.000,00	APBD		86 Unit	96.000.000,00		
		008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ketersediaan alat dan tenaga kebersihan kantor	Kabupaten	30 Orang	519.158.544,00	APBD		30 Orang	571.074.398,40		
		010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	Kabupaten / Kecamatan	1 Tahun	1.648.998.000,00	APBD		1 Tahun	1.978.797.600,00		
		011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan kantor dinas, upt dan jaringannya	Kabupaten / Kecamatan	1 Tahun	831.884.652,00	APBD		1 Tahun	998.261.582,00		
		012	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah ketersediaan peralatan listrik kantor dinas, upt dan jaringannya	Kabupaten / Kecamatan	1 Tahun	200.184.500,00	APBD		1 Tahun	240.221.400,00		
		015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan dan media cetak	Kabupaten	1 Tahun	12.000.000,00	APBD		1 Tahun	14.400.000,00		
		017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman kantor dinas dan upt	Kabupaten / Kecamatan	1 Tahun	610.780.000,00	APBD		1 Tahun	732.936.000,00		
		019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah ketersediaan tenaga keamanan kantor	Kabupaten / Kecamatan	35 Orang	806.560.000,00	APBD		35 Orang	967.872.000,00		
		028	Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah	Jumlah ketersediaan kegiatan koordinasi dan konsultasi	Kabupaten / Kecamatan	1 Tahun	939.692.000,00	APBD		1 Tahun	1.127.630.000,00		
		032	Pembinaan pegawai dan penilaian jabatan fungsional tenaga kesehatan	Jumlah pembinaan dan penilaian nakes fungsional	Kabupaten / Kecamatan	585 ASN	232.512.600,00	APBD		585 ASN	279.015.120,00		
		033	Penyediaan jasa sopir	Jumlah ketersediaan tenaga pengemudi kantor	Kabupaten / Kecamatan	20 Orang	345.600.000,00	APBD		20 Orang	414.720.000,00		
		xxx	Penyediaan komunikasi dan informasi publik	Jumlah penyebaran informasi kesehatan bagi masyarakat	Kabupaten	1 Tahun	170.000.000,00	APBD		1 Tahun	187.000.000,00		
			Persentase kualitas pengelolaan barang milik daerah dinas kesehatan 100%	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan gedung kantor		95%	2.660.878.400,00			0,95	3.193.054.080,00
				003	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan pendukung gedung kantor	Kabupatenn	1 unit	336.277.400,00	APBD		100%	403.532.880,00
				007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana perlengkapan kantor	Kabupaten	15 unit	373.700.000,00	APBD		15 unit	448.440.000,00
				009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah sarana peralatan kantor	Kabupaten	10 Unit	289.261.000,00	APBD		10 Unit	347.113.200,00
			022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dinas kesehatan	Kabupaten	1 Tahun	265.000.000,00	APBD		1 Tahun	318.000.000,00	
		024	Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas kesehatan	Kabupaten	40 Unit	806.640.000,00	APBD		40 Unit	967.968.000,00		

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Hasil) / Kegiatan (Output/Keluaran)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
		028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dinas kesehatan	Kabupaten	1 Tahun	240.000.000,00	APBD		1 Tahun	288.000.000,00
		xxx	Pengadaan tanah	Jumlah pengadaan tanah mushalla dan labkesda	Kabupaten	1 Unit	350.000.000,00	APBD		1 Unit	420.000.000,00
	Cakupan peningkatan kompetensi dan disiplin aparatur 95%	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin dan kinerja aparatur		91%	7.282.073.400,00			92%	8.738.488.080,00
		013	Penilaian kinerja PNS Tenaga Kesehatan	Jumlah penilaian kinerja SKP PNS	Kabupaten	666 Orang	7.282.073.400,00	APBD		666 Orang	8.738.488.080,00
		05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kompetensi aparatur		90%	1.667.300.000,00			92%	1.870.300.000,00
		049	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Tenaga Kesehatan (PSDMK)	Jumlah aparatur mengikuti pelatihan teknis fungsional	Kabupaten	150 Org	481.816.000,00	APBD		150 Org	515.000.000,00
		086	Pemutakhiran data pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan	Jumlah laporan data tenaga kesehatan	Kabupaten	1 dok	130.000.000,00	APBD		1 dok	143.000.000,00
		xxx	Pengembangan pendayagunaan SDM Kesehatan	Jumlah aparatur mengikuti analisis jabatan dan beban kerja	Kabupaten	60 Org	125.000.000,00	APBD		60 Org	137.500.000,00
		xxx	Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	Jumlah peserta pelathan MTBS	Kabupaten	60 Org	300.000.000,00	APBD		60 Org	330.000.000,00
		xxx	Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)	Jumlah peserta pelatihan APN	Kabupaten	15 Org	126.484.000,00	APBD		15 Org	140.000.000,00
		xxx	Evaluasi Pasca Pelatihan	Jumlah peserta pelatihan yang dievaluasi	Kabupaten	50 Org	252.000.000,00	APBD		50 Org	302.400.000,00
		xxx	Bimbingan Teknis Manajemen Puskesmas	Jumlah peserta bimbingan teknis manajemen Puskesmas	Kabupaten	40 Org	252.000.000,00	APBD		40 Org	302.400.000,00
	Cakupan peningkatan kualitas penyusunan program dan informasi kesehatan 95%	06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase barang yang dicatat dan dilaporkan mendapat status nilai aset	Kabupaten	85%	636.844.970,00			89%	700.529.467,00
				Persentase laporan SPM dan Profil Kesehatan	Kabupaten	100%				100%	
				Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi program	Kabupaten	91%				93%	
				Persentase tersedianya data dan informasi kesehatan	Kabupaten	91%				93%	
	Cakupan barang milik daerah dinas kesehatan memiliki nilai aset 100%	010	Inventarisasi aset daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah kantor dinas kesehatan	Kabupaten	3 Dok	126.287.400,00	APBD		3 Dok	138.916.140,00
		011	Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja SPM dan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan capaian SPM dan data informasi kesehatan yang berkualitas	Kabupaten	3 Dok	186.638.870,00	APBD		3 Dok	205.302.757,00
		027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi program yang berkualitas	Kabupaten	3 Dok	154.247.000,00	APBD		3 Dok	169.671.700,00
		xxx	Pengelolaan data dan informasi kesehatan	Jumlah laporan data dan informasi kesehatan yang berkualitas	Kabupaten	2 Dok	169.671.700,00	APBD		2 Dok	186.638.870,00
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin sesuai kebutuhan 92%	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas		87%	9.096.940.086,00			89%	9.964.411.366,40
				Persentase pembinaan dan pengawasan peredaran obat dan Makanan		85%				87%	
		001	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah item obat dan vaksin tersedia di Puskesmas	Kabupaten	257 item	8.252.485.522,00	APBD		263 item	9.077.734.074,20
		002	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang telah terdistribusi obat dan perbekalan kesehatan	Kecamatan	151 Unit	563.952.584,00	APBD		151 Unit	592.150.213,20
	Cakupan pembinaan dan pengawasan peredaran obat dan Makanan 90%	xxx	Pembinaan dan Pengawasan obat dan Makanan	Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan pengawasan	Kecamatan	65 Unit	280.501.980,00	APBD		75 Unit	294.527.079,00

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Hasil) / Kegiatan (Output/Keluaran)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Rasio posyandu 3 per 100 balita Cakupan kunjungan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 100%	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio posyandu per 100 balita		1,5	70.648.288.003,00			2	74.735.210.003,30	
				Persentase kunjungan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu		92%				94%		
				Persentase kunjungan pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan di FKTP		90%				92%		
				Persentase pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin		75%				80%		
				Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan melalui Perkesmas		65%				70%		
				Persentase Puskesmas yang menerima dana bantuan operasional kesehatan		100%				100%		
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100%	009	Peningkatan Kesehatan masyarakat	Jumlah posyandu aktif	Kecamatan	459 Pos	600.233.979,00	APBD		459 Pos	660.257.376,90	
				025	Peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Kecamatan	86.052 Org	14.131.817.124,00	APBD	89.150 Org	15.544.998.836,40
						028	Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda)	Jumlah pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmasda	Kabupaten / Kecamatan	300.000 Jiwa	39.472.482.500,00	APBD
				030	Pelayanan kesehatan rujukan			Jumlah pelayanan kesehatan rujukan di strata 1	Kabupaten / Kecamatan	4.302 Org	275.000.000,00	APBD
						032	Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN)	Jumlah peserta BPJS yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP	Kabupaten / Kecamatan	115.050 Jiwa	12.708.766.400,00	APBD
				033	Pendamping Pelaksanaan Kegiatan JKN oleh Daerah			Jumlah peserta BPJS yang mendapat pelayanan rujukan di strata 1 dan 2	Kabupaten / Kecamatan	1.726 Org	528.000.000,00	APBD
						034	Perawatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	Kecamatan	11 PKM	224.800.000,00	APBD
				035	Penyediaan bantuan operasional kesehatan			Jumlah puskesmas yang menerima bantuan operasional kesehatan	Puskesmas	17 PKM	2.707.188.000,00	APBD / APBN
Cakupan penjangkaran kesehatan peserta didik kelas 1, 7 dan 10 diperiksa 100%	19	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase desa ber PHBS				70%	1.177.107.678,00			85%	1.294.818.445,80
			Cakupan desa siaga Aktif		80%				80%			
			Persentase penjangkaran kesehatan anak didik kelas 1, 7 dan 10		80%				85%			
			Persentase rumah tangga melaksanakan PHBS		70%				75%			
	008	Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah penyebaran media informasi dan promosi kesehatan	Desa	45 Kali	272.008.000,00	APBD		54 Kali	299.208.800,00		
			009	Pembantuan desa siaga dan pembinaan fasilitator desa siaga	Jumlah desa siaga aktif	Desa	124 Desa	405.099.678,00	APBD	132 Desa	445.609.645,80	
					xxx	Pembinaan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Sekolah	Jumlah anak didik kelas 1, 7 dan 10 dilakukan pemeriksaan kesehatan	Sekolah	22,741 Anak Didik	250.000.000,00	APBD	22,741 Anak Didik
			xxx	Pembinaan rumah tangga ber PHBS			Jumlah rumah tangga ber PHBS dibina	Desa	94,278 RT	250.000.000,00	APBD	102,135 Rumah
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan Balita Kurus yang mendapat makanan tambahan 90% Cakupan ibu hamil kurang energi kronik (KEK) mendapat makanan tambahan 95%	20			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi kurang (kurus) 9,5%		9,5%	2.281.150.400,00			9%
			Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) mendapat makanan tambahan			75%				85%		
			Persentase Balita gizi kurang (kurus) mendapat makanan tambahan			80%				85%		
			Persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah 90 tablet			90%				95%		

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Hasil) / Kegiatan (Output/Keluaran)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018																	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif																
Cakupan ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah 98%	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100%	001	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Cakupan peserta mengikuti pertemuan integrasi program gizi, kia dan promkes		100%				100%																	
				Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan		100%				100%																	
				Jumlah balita dengan gizi kurang (kurus)	Kabupaten	105 Balita	256.449.500,00	APBD		105 Balita	250.994.450,00																
				Jumlah balita gizi kurang (kurus) mendapat PMT	Kabupaten	105 Balita	906.511.400,00	APBD		105 Balita	997.162.540,00																
				Jumlah ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan	Kabupaten	105 Bumil KEK	937.000.000,00	APBD		105 Bumil KEK	1.030.700.000,00																
				Jumlah ibu hamil mendapat tablet tambah darah 90 Tablet	Kabupaten	11,741 Bumil		APBD		12,684 Bumil																	
				Jumlah peserta pertemuan integrasi	Kabupaten	51 Org	104.189.500,00	APBD		51 Org	114.608.450,00																
				Jumlah kasus gizi buruk yang mendapat perawatan	Kabupaten	2 Org	77.000.000,00	APBD		2 Org	84.700.000,00																
				Cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan Stop Buang Air Sembarangan (SBS) 107 Desa/Kel	Cakupan sarana air minum yang dilakukan pengawasan 65%	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase rumah tangga bebas jentik nyamuk DBD		60%	4.700.000.000,00			65%	6.420.000.000,00												
								Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan		45%				50%													
Persentase penduduk menggunakan jamban sehat		80%								85%																	
Desa/kelurahan yang melaksanakan Stop Buang Air Sembarangan (SBS)		67 Desa / Kel								77 Desa / Kel																	
Persentase tempat pengelola makanan dan minuman memenuhi syarat kesehatan		21%								27%																	
Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) memenuhi syarat kesehatan		40%								45%																	
Persentase alat laboratorium kesehatan lingkungan sesuai standar		30%								37%																	
Persentase Puskesmas memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup		28%								44%																	
Cakupan Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) memenuhi syarat kesehatan 65%	Cakupan rumah tangga bebas jentik nyamuk DBD 80%	003	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat					Jumlah rumah yang dilakukan pemeriksaan jentik DBD	Desa/Kel	94.278 Rumah	900.000.000,00	APBD		102,135 Rumah	990.000.000,00												
								Cakupan operasional laboratorium kesehatan lingkungan sesuai standar 100%	019	Sosialisasi Pemeriksaan Kualitas Air Minum Depot Isi Ulang (DAM)	Jumlah sarana air minum memenuhi syarat kesehatan	Kabupaten / Kecamatan	27 DAM	250.000.000,00	APBD		35 DAM	275.000.000,00									
				Cakupan Puskesmas melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup 100%	020	Penyediaan air minum dan sanitasi dasar berbasis masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah penduduk menggunakan jamban sehat				Kabupaten / Kecamatan	430.262 Jiwa	250.000.000,00	APBD		447.473 Jiwa	275.000.000,00										
							xxx				Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan pemucuan SBS dan CTPS	Desa/Kel	67 Desa / Kel	200.000.000,00	APBD		77 Desa / Kel	220.000.000,00								
												xxx	Pelayanan Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) memenuhi syarat kesehatan	Kabupaten / Kecamatan	270 IRTP	150.000.000,00	APBD		284 IRTP	165.000.000,00						
														xxx	Pemeriksaan Tempat Pengelola Makanan dan Minuman (TPM)	Jumlah tempat pengelola makanan dan minuman memenuhi syarat kesehatan	Kabupaten / Kecamatan	258 TPM	200.000.000,00	APBD		283 TPM	220.000.000,00				
																xxx	Penyediaan Sarana dan Prasarana Laborarium Lingkungan	Jumlah alat laboratorium kesehatan lingkungan yang tersedia	Kabupaten	10 Set	250.000.000,00	APBD		15 Set	275.000.000,00		
																		xxx	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Puskesmas	Jumlah Puskesmas memiliki dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten	5 PKM	2.500.000.000,00	APBD		8 PKM	4.000.000.000,00

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Hasil) / Kegiatan (Output/Keluaran)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi 100% Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA (+) 100% Cakupan keberhasilan pengobatan TB Paru BTA positif (Sukses Rate) 100% Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100% Cakupan penemuan dan penanganan penderita tekanan darah tinggi 35% Cakupan penemuan dan penanganan penderita tekanan darah tinggi 35%	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase anak murid kelas 1,2 dan 3 mendapatkan imunisasi		90%	8.065.000.000,00			92%	8.861.500.000,00
				Persentase bayi 0 - 11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap		93%				94%	
				Persentase Balita usia 0 - 59 bulan mendapat vaksinasi Polio		≥ 95%				≥ 95%	
				Persentase Balitas 9 - 59 bulan mendapat vaksinasi campak		≥ 95%				≥ 95%	
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB Paru BTA Positif		100%				100%	
				Persentase keberhasilan pengobatan TB Paru BTA positif (Sukses Rate)		85%				86%	
				Persentase penderita pneumoni pada balita diobati		100%				100%	
				Persentase penderita kusta tanpa cacat ditemukan		95%				95%	
				Persentase penduduk usia 2 - 65 tahun minum obat POMP Filariasis		85%				85%	
				Persentase penderita diare pada balita diobati		100%				100%	
				Persentase kasus HIV AIDs yang ditemukan		100%				100%	
				Persentase kasus gigitan HPR mendapatkan vaksin VAR		100%				100%	
				Persentase kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam		100%				100%	
				Persentase JCH yang dilakukan pemeriksaan kesehatan selama 3 bulan		100%				100%	
				Prevalensi HIV(+) per 100.000 penduduk		0.2				0.2	
				Jumlah API per 1000 penduduk		< 1				< 1	
				Jumlah AFP per 100.000 penduduk		< 2				< 2	
				Persentase pemeriksaan spesimen kasus campak		15%				15%	
				Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		100%				100%	
				Persentase penemuan dan penanganan penderita tekanan darah tinggi		18%				20%	
Persentase masyarakat yang mendapatkan pengetahuan penyakit menular		2%				2%					
		004	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Jumlah anak didik kelas 1,2,3 SD/MI diimunisasi	Sekolah	10.430 Murid	500.000.000,00			12.952 Murid	560.000.000,00
		008	Peningkatan Imunisasi	Jumlah bayi 0-11 bulan, balita 9-59 bulan dan 0 - 59 bulan diimunisasi	Kecamatan	74.622 Balita	1.500.000.000,00			76.684 Balita	1.650.000.000,00

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Hasil) / Kegiatan (Output/Keluaran)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
		014	Penanggulangan penyakit TB Paru Sistem DOTS	Jumlah penemuan dan pengobatan penderita baru TB Paru BTA Positif	Kabupaten / Kecamatan	483 Org	500.000.000,00			507 Org	550.000.000,00
		015	Penanggulangan ISPA	Jumlah penderita pneumoni pada balita yang diobati	Kabupaten / Kecamatan	1,012 balita	150.000.000,00			812 Kasus	165.000.000,00
		016	Penanggulangan P2 Kusta	Jumlah penderita baru kusta tanpa cacat ditemukan	Kabupaten / Kecamatan	3 kasus	200.000.000,00			3 kasus	200.000.000,00
		017	Penanggulangan P2 Filariasis	Jumlah penduduk usia 2 - 65 Tahun mendapatkan obat POMP Filariasis	Kabupaten / Kecamatan	501,138 Org	150.000.000,00			501,138 Org	165.000.000,00
		018	Penanggulangan P2 Diare	Jumlah penderita diare pada balita yang diobati	Kabupaten / Kecamatan	11.166 balita	100.000.000,00			11.166 balita	110.000.000,00
		019	Pelacakan kasus HIV AIDs sero survey	Jumlah penderita HIV AIDS ditemukan	Kabupaten / Kecamatan	3 Kasus	350.000.000,00			3 Kasus	385.000.000,00
		022	Pengendalian kasus gigitan Hewan Penular Rabies (HPR)	Jumlah kasus gigitan HPR mendapat Vaksin	Kabupaten / Kecamatan	5 Kasus	200.000.000,00			5 Kasus	220.000.000,00
		026	Penanggulangan KLB/ Wabah Penyakit Menular dan Keracunan	Jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam	Kabupaten / Kecamatan	1 Kasus	250.000.000,00			1 Kasus	275.000.000,00
		027	Pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan jemaah calon haji	Jumlah Jemaah Calon Haji yang diperiksa kesehatannya selama 3 bulan	Kabupaten / Kecamatan	470 JCH	715.000.000,00			480 JCH	786.500.000,00
		030	Pengendalian dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS	Jumlah pengendalian penyakit HIV/AIDS di masyarakat	Kabupaten	1 Tahun	600.000.000,00			1 Tahun	660.000.000,00
		031	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit malaria	Jumlah penderita malaria positif ditemukan mendapat pengobatan ACT	Kabupaten / Kecamatan	5 Kasus	150.000.000,00			5 Kasus	165.000.000,00
		032	Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit Polio	Jumlah kasus AFP yang ditemukan	Kabupaten / Kecamatan	3 Kasus	100.000.000,00			3 kasus	110.000.000,00
		033	Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit Campak	Jumlah pemeriksaan spesimen suspect campak yang ditemukan	Kabupaten / Kecamatan	1 Kasus	100.000.000,00			1 Kasus	110.000.000,00
		035	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit DBD	Jumlah penemuan dan penanganan penderita DBD	Kabupaten / Kecamatan	678 Kasus	1.500.000.000,00			678 Kasus	1.650.000.000,00
		036	Pengendalian dan Pelayanan Penyakit Tidak Menular	Jumlah penemuan dan penanganan penderita tekanan darah tinggi	Kabupaten / Kecamatan	500 org	500.000.000,00			550 org	550.000.000,00
		xxx	Promosi kesehatan pencegahan penyakit menular	Jumlah promosi preventif penyakit menular yang dilaksanakan di masyarakat	Kabupaten / Kecamatan	100 Kali	500.000.000,00			110 Kali	550.000.000,00
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Persentase Puskesmas Terakreditasi 100% Rasio Dokter per 100.000 penduduk ; dokter umum (47) spesialis (13) dokter gigi (15) Rasio Paramedis per 100.000 penduduk ; Bidan (120) Perawat (130) Apoteker (12) Ahli gizi (13) Kesmas (16) Sanitarian (12)	23	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase tersedianya tenaga dan fasilitas kesehatan sesuai standar		90%	2.564.011.700,00			92%	2.692.212.285,00
				Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang memiliki izin		75%				85%	
				Persentase Puskesmas yang menggunakan jaringan data Sikda Generik		30%				41%	
				Persentase Puskesmas Terakreditasi		35%				65%	
				Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan tenaga kesehatan		100%				100%	
				006	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan evaluasi SDM kesehatan yang berkualitas	Kabupaten / Kecamatan	1 dok	65.000.000,00	APBD	
		017	Penilaian dan Penghargaan Saran Terbaik dan Tenaga Kesehatan Teladan	Jumlah sarana dan tenaga kesehatan memperoleh penghargaan terbaik dan teladan	Kabupaten / Kecamatan	19 Org/unit	285.000.000,00	APBD		19 Org/unit	299.250.000,00
018	Pembinaan pengawasan pelayanan kesehatan dan monitoring prizinan pelayanan kesehatan	Jumlah rekomendasi perizinan yang ditetapkan untuk sarana dan tenaga kesehatan	Kabupaten / Kecamatan	85 Unit/Org	250.000.000,00	APBD		90 Unit/Org	262.500.000,00		

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Hasil) / Kegiatan (Output/Keluaran)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
		019	Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik	Jumlah Puskesmas menggunakan SIKDA Generik	Kecamatan	5 Unit	582.186.700,00	APBD		7 Unit	611.296.035,00
		021	Pelaksanaan akreditasi Puskesmas	Jumlah Persiapan Akreditasi 4 Puskesmas dan Pelaksanaan Akreditasi 2 Puskesmas	Kecamatan	6 PKM	740.825.000,00	APBD / APBN		11 PKM	777.866.250,00
		xxx	Penyusunan perencanaan dan Kebutuhan SDM Kesehatan	Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan yang disusun sesuai standar	Kabupaten	1 dok	156.000.000,00	APBD		1 dok	163.800.000,00
		xxx	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tenaga dan fasilitas kesehatan	Jumlah peserta mengikuti sosialisasi	Kabupaten	150 org	485.000.000,00	APBD		150 org	509.250.000,00
	Rasio Puskesmas 8 per 100.000 penduduk Rasio Puskesmas Pembantu 10 per 100.000 penduduk	25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rasio sarana kesehatan per 100.000 penduduk Persentase Puskesmas memiliki alat kesehatan sesuai standar		per 100.000 90%	15.497.002.713,00			per 100.000 92%	16.271.852.848,65
		006	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah ketersediaan peralatan kesehatan di Puskesmas sesuai standar	Kabupaten	20 set	1.628.879.742,00	APBD		20 set	1.710.323.729,10
		025	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan	Kabupaten	20 unit	13.868.122.971,00	APBD		20 unit	14.561.529.119,55
	Rasio RS 1 per 100.000 penduduk	26	Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk Persentase pelaksanaan pembangunan rumah sakit tipe D Pratama		1 55%	17.092.922.550,00			1 70%	21.754.628.700,00
		001	Pembangunan rumah sakit	Jumlah pembangunan rumah sakit tipe D Pratama Pulau Rupa	Kecamatan	1 unit	17.092.922.550,00	APBD		1 unit	21.754.628.700,00
	Cakupan bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif 57% Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 90%	29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif Persentase pelayanan kesehatan anak balita		45% 70%	692.003.000,00			48% 75%	981.203.300,00
		012	Penatalaksanaan Asi Eksklusif dan Konseling Menyusui	Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	Kecamatan	11.531 Bayi	446.001.500,00	APBD	345,93	11.939 Neonatal	490.601.650,00
		xxx	Pelayanan kesehatan anak balita	Jumlah anak balita mendapatkan pelayanan kesehatan minimal 8 kali	Kecamatan	55,762 Anak Balita	246.001.500,00	APBD		57,736 Anak Balita	490.601.650,00
	Cakupan kelompok lansia dibina 100%	30	Program Peningkatan pelayanan kesehatan Lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Persentase posyandu lansia aktif Jumlah posyandu lansia aktif dibina		100% 100 Pos	228.028.966,00 228.028.966,00	APBD		100% 100 Pos	250.831.862,00 250.831.862,00
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 82 % Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 97% Cakupan kunjungan bayi 100% Cakupan pertolongan persalinan difasilitas kesehatan 87% Angka Kematian Bayi (AKB) 1 per 1.000 KLH	32	Program Peningkatan Kesehatan Ibu melahirkan dan anak	Persentase pertolongan persalinan difasilitas kesehatan Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali (K4) Persentase neonatal mendapatkan pelayanan sesuai standar minimal 3 kali Persentase Puskesmas melaksanakan P4K		81% 92% 74% 90% 87% 24%	5.705.420.560,00			83% 93% 77% 91% 88% 47%	6.432.890.616,00

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Hasil) / Kegiatan (Output/Keluaran)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
	Cakupan pertolongan persalinan difasilitasi kesehatan 87% Angka Kematian Bayi (AKB) 1 per 1.000 KLH			Persentase neonatal mendapatkan pelayanan sesuai standar minimal 3 kali		87%				88%	
				Persentase Puskesmas melaksanakan P4K		24%				47%	
	Angka Kematian Ibu (AKI) 110 per 100.000 KLH	003	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	Jumlah pertolongan persalinan difasilitasi kesehatan	Kabupaten / Kecamatan	10,911 Bulin	330.000.000,00	APBD		12.108 Bulin	363.000.000,00
	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	004	Pembinaan kemitraan bidan dan dukun bayi	Jumlah persalinan oleh nakes memiliki kompetensi kebidanan	Kabupaten / Kecamatan	10,911 Bulin	220.000.000,00	APBD		12.108 Bulin	242.000.000,00
	Cakupan pelayanan neonatal lengkap (KN) Lengkap 90%	005	Pendataan penjarangan dan rujukan ibu hamil dan bayi risiko tinggi	Jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani	Kabupaten / Kecamatan	1.679 Kasus	165.000.000,00	APBD		2.537 Kasus	181.500.000,00
	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 100%	020	Pelayanan kesehatan jaminan persalinan	Jumlah pertolongan persalinan difasilitasi kesehatan	Kabupaten / Kecamatan	10,911 Bulin	4.086.548.560,00	APBD / APBN		12.108 Bulin	4.495.203.416,00
		xxx	Peningkatan Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali (K4)	Kabupaten / Kecamatan	11.741 Bumil	319.232.000,00	APBD		12.684 Bumil	351.155.200,00
		xxx	Peningkatan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Neonatal mendapatkan pelayanan sesuai standar minimal 3 kali	Kabupaten / Kecamatan	10.063 Neonatal	192.320.000,00	APBD		11.939 Neonatal	211.552.000,00
		xxx	Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi	Jumlah Puskesmas melaksanakan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)	Kabupaten / Kecamatan	4 PKM	392.320.000,00	APBD		8 PKM	588.480.000,00
Jumlah BTL + BL							235.889.150.484,00				246.486.157.132,75

Bengkalis, 23 Februari 2016

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS

H. MOH. SUKRI, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195912301985031008